

“Pembangunan Hutan di Provinsi Riau Suatu Studi Strategi Pengendalian *Greenpeace* dalam Pengawasan Hutan”

OLEH :

Putri Lindung Bulan

Email : Pbulan21@gmail.com

Pembimbing : Dr. H. Zaili Rusli SD, M.Si

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK JURUSAN ILMU
ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS RIAU**

Kampus Bina Widya Jl. H. R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Greenpeace is an INGO (International Non-Government Organization) which is an independent organization financially and organisationally. Greenpeace is an environmental organization that is campaigning. Activities undertaken by Greenpeace is soft activity and are NVDA (Non Violent Direct Action) that perform direct action in accordance with the issue and without violence. Public campaign by Greenpeace in Indonesia include, Sea, Forest, Toxic Waste and Renewable Energy. However, for in Riau Province Alone most focused campaign is mengenai Forest.

Problems of forest in Riau Province is very difficult to find a way out to block the opening of new land by burning the land every year. Greenpeace as environmental organizations feel the need to participate in order to save the remaining forests and voice to the burning of land that they are doing is wrong. Seeing the weakening pengawasan of government and legal regulations on forest make some mengeluarkan Greenpeace campaign on forests of Riau and Sumatra. However, due to the government or organization Greenpeace is not bound to make limited motion governance authority decisions taken by Greenpeace.

Keywords: Greenpeace, Forest, Riau Province

PENDAHULUAN

Kerusakan hutan alam dan lahan gambut di Riau telah sering terjadi belakangan ini. Kerusakan ini diakibatkan oleh adanya penebangan pohon di kawasan hutan alam, dan pembukaan lahan gambut dengan cara membakarnya. Penebangan hutan ini dilakukan oleh beberapa perusahaan besar yang bergerak dalam bidang pertambangan, produksi kayu dan kertas, dan perkebunan kelapa sawit. Kerusakan hutan yang diakibatkan perusahaan penebang pohon ini telah menimbulkan beberapa dampak yang buruk terhadap keseimbangan ekosistem hutan di Riau. Dampak buruk tersebut seperti polusi air, udara, berkurangnya populasi hewan seperti Harimau Sumatera dan Gajah Sumatera yang merupakan hewan yang hampir punah. Selain itu, dampak buruk lainnya adalah adanya konflik sosial pada masyarakat adat asli yang mendiami hutan yang ada di Riau.

Melihat parahnya kerusakan yang terjadi pada hutan alam dan lahan gambut di Riau, membuat pemerintah berinisiatif untuk membuat peraturan perundangan yang berisi tentang aturan pengelolaan hutan dan lingkungan yang baik. Undang-undang yang berisi tentang aturan pengelolaan hutan dan lingkungan yang baik. Undang-undang yang pertama mengatur adalah Undang-undang No. 4 Tahun 1982 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan perkembangannya, Undang-undang tersebut diganti menjadi Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemerintah juga mengeluarkan beberapa kebijakan lain di tahun-tahun berikutnya, yaitu moratorium hutan, yaitu penghentian sementara pemberian izin pembukaan lahan baru untuk dijadikan hutan produksi kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Riau. Di tahun-tahun berikutnya pemerintah mengeluarkan sebuah laporan yang berisi mengenai data-data vegetasi maupun hewan yang terdapat didalam

hutan Riau dan mengenai kerusakan hutan yang terjadi setiap tahunnya. Semua regulasi tersebut masih sangat kurang dan dianggap lemah bagi beberapa pihak karena tidak direalisasikan dengan baik oleh pemerintah sehingga masih terjadi penebangan hutan oleh perusahaan. Melihat kurang efektif dari kebijakan yang ada, muncul beberapa pihak yaitu NGO (*Non Government Organization*) bidang lingkungan hidup yang ingin membantu proses penanganan kerusakan hutan alam dan lahan gambut di Riau. Salah satu organisasi lingkungan hidup itu adalah *Greenpeace*. *Greenpeace* merasa perlu turun tangan untuk mempengaruhi penanganan kerusakan hutan alam dan lahan gambut di Riau karena melihat tidak adanya tindak lanjut dari pemerintah untuk menangani permasalahan ini.

Greenpeace merupakan salah satu *International Non-Governmental Organization* yang bergerak dalam bidang pelestarian lingkungan hidup. *Greenpeace* didirikan di Vancouver, British Columbia, Kanada pada tahun 1971 oleh sekelompok aktivis Kanada dan Amerika yang membentuk formasi "*Don't Make A Wave Committee*" di Vancouver. Pada awalnya, fokus utama kampanye *Greenpeace* hanya pada anti nuklir dan perlindungan terhadap hewan laut terutama ikan paus. Mulai tahun 1990 *Greenpeace* mulai melihat hal lain yang lebih buruk dan mengancam eksistensi lingkungan hidup, sehingga *Greenpeace* kemudian memperluas isu kampanyenya, yaitu, perubahan iklim, pencemaran lingkungan akibat bahan kimia beracun, teknologi genetika serta perdagangan berkelanjutan (*sustainable trade*) yang ramah lingkungan. Selama ini aksi-aksi kampanye yang dilakukan *Greenpeace* di banyak negara selalu berhasil mengubah kebijakan pemerintahan dari yang tidak berpihak pada pelestarian lingkungan, menjadi kebijakan yang mendukung lingkungan dan perdamaian. Tonggak keberhasilan *Greenpeace* pertama kali adalah

menghentikan percobaan nuklir Amerika Serikat di pulau Amchitka, Alaska. Pada saat itu Greenpeace mampu mengubah kebijakan pemerintah Amerika Serikat untuk menghentikan percobaan senjata nuklir di pulau Amchitka dan memetakan kawasan itu sebagai kawasan lindung untuk burung-burung.

Mulai tahun 2001 Greenpeace masuk ke Indonesia dan terus-menerus melakukan aksi kampanye untuk melindungi lingkungan hidup yang ada di Indonesia. Salah satu isu lingkungan yang menjadi target kampanye Greenpeace di Indonesia adalah kerusakan hutan rawa gambut yang terjadi di wilayah Semenanjung Kampar Propinsi Riau. *Greenpeace* memiliki 10 kantor yang ada di Indonesia, yang masing-masing memiliki *volunteer* yang siap untuk berkegiatan bersama *Greenpeace* ketika adanya isu yang akan di kampanyekan diantaranya,: Padang, Pekanbaru, Jakarta (yang merupakan kantor pusat dari *Greenpeace* Indonesia), Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Bali, Manokwari dan Papua. Ada beberapa daerah yang dengan kondisi lingkungan yang buruk, *Greenpeace* pernah melakukan kampanye lingkungan sesuai dengan isu yang ada pada daerah tersebut.

Secara internasional banyak berbagai macam kampanye yang diusung oleh *Greenpeace* melihat banyaknya permasalahan secara universal, namun untuk Indonesia sendiri *Greenpeace* hanya memiliki 4 macam kampanye yang diusung untuk Indonesia dan pada daerah tertentu akan lebih di spesifikasikan tergantung dengan potensi daerah masing-masing. Secara umum ini 4 macam kampanye yang diusung oleh *Greenpeace*, diantaranya;

- Laut : Kampanye Greenpeace 'Menjaga Laut Kita' dimaksudkan untuk melindungi dan menjaga laut kita sekarang dan di masa depan dengan cara menyingkirkan bagian

dari laut global sebagai Cagar Alam Laut (*Marine Reserves*) yang bebas dari eksploitasi dan kendali tekanan manusia, memungkinkan kawasan-kawasan laut ini mendapatkan waktu jeda yang sangat dibutuhkan untuk pemulihan dan pembaharuan. Greenpeace juga mendorong agar setiap negara memiliki daerah konservasi lautnya sendiri yang dikembangkan bersama masyarakat dan menghormati hak-hak adat dan hak kelola sumber penghidupannya

- Limbah Beracun : Produksi, perdagangan, penggunaan, dan pembuangan bahan kimia saat ini menjadi ancaman global kesehatan manusia dan lingkungan. Namun, sampai saat ini industri kimia dunia terus menghasilkan dan membuang ribuan senyawa kimia setiap tahunnya. Dalam banyak kasus tanpa pengujian atau penelitian memadai serta ketidakmengertian mereka akan dampaknya pada masyarakat dan lingkungan.
- Hutan : Di seluruh dunia, hutan-hutan alami sedang dalam krisis. Tumbuhan dan binatang yang hidup didalamnya terancam punah. Dan banyak manusia dan kebudayaan yang menggantungkan hidupnya dari hutan juga sedang terancam. Tapi tidak semuanya merupakan kabar buruk. Masih ada harapan untuk menyelamatkan hutan-hutan ini dan menyelamatkan mereka yang hidup dari hutan. Hutan purba dunia sangat beragam.
- Iklim : Perubahan iklim global merupakan kekacauan yang akan datang. Kita telah mengetahui sebabnya yaitu manusia yang terus menerus menggunakan bahan bakar yang berasal dari fosil seperti batu bara, minyak bumi dan gas bumi. Menghentikan ketergantungan terhadap energi

kotor, melakukan revolusi untuk energi terbarukan.

Greenpeace terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu perkumpulan. *Greenpeace* dalam hal ini terdaftar di bagian perkumpulan, yang didaftarkan atas nama Istiaty Aisyah Soepono di Jakarta dengan nama Perkumpulan *Greenpeace Sea Indonesia Chapter*, Nomor SKI AHU-128. AH. 01.06 pada tanggal 4 Desember 2009.

Namun, sebesar apapun organisasi pasti mempunyai kelemahan dan kekurangan, termasuk *Greenpeace* juga memiliki kekurangan dan kelebihan sebagai organisasi, diantaranya kelebihan dari organisasi ini adalah:

- *Greenpeace* adalah organisasi independen yang tidak terikat oleh pemerintah maupun swasta.
- *Greenpeace* memiliki sumber dana sendiri yang berasal dari donatur/*supporter* dan bukan dari instansi manapun.
- *Greenpeace* memakai strategi kreatif anti kekerasan dan menyesuaikan dengan budaya masing-masing daerah yang ada di Indonesia.
- Penggunaan *Media Campaign* yang dilakukan dalam berkampanye.

Namun ada jga beberapa kelemahan dari organisasi *Greenpeace* diantaranya,:

- Dikarenakan *Greenpeace* organisasi internasional, banyak penolakan terhadap organisasi ini dan menyebabkan tersendatnya beberapa kampanye maupun aksi.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Strategi

Menurut **Kuncoro (2005: 12)** strategi merupakan sejumlah keputusan dan aksi yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan (goal) dan menyesuaikan sumber daya

organisasi dengan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam lingkungan industrinya, dengan demikian, ciri-ciri strategi yang utama adalah:

- a. *Goal-directed actions*, yaitu aktivitas yang menunjukkan “apa” yang diinginkan organisasi dan “bagaimana” mengimplementasikannya,
- b. Mempertimbangkan semua kekuatan internal (sumber daya dan kapasitasnya),
- c. Serta memperhatikan peluang dan tantangan.

Menurut **ellitan (2008: 9)** ada beberapa strategi yang bisa diterapkan pada suatu organisasi atau perusahaan, yaitu sebagai berikut:

1. Strategi Teknologi

Penemuan-penemuan baru dalam bidang teknologi memerlukan sumber daya baru untuk menambah manfaat dari aktivitas organisasi atau perusahaan. Teknologi merupakan peluang dan sekaligus tantangan bagi organisasi atau perusahaan saat ini. Teknologi akan dirasakan sebagai tantangan jika organisasi tidak tahu bagaimana menggunakan teknologi dan mengelolanya secara strategik. Jika teknologi dikelola dengan baik sejak fase rencana adopsi sampai implementasinya, teknologi akan memberikan manfaat dan peluang secara strategik dalam jangka panjang. Sebagian organisasi atau perusahaan masih memandang teknologi hanya sebagai alat dan sumber daya untuk produksi dan juga teknologi belum diintegrasikan dengan strategi bidang fungsional organisasi dan strategi bisnis.

2. Strategi Inovasi

Inovasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam mencapai keunggulan kompetitif. Tanpa inovasi organisasi atau perusahaan akan mati. Organisasi atau perusahaan yang

melakukan inovasi secara terus-menerus akan mendapatkan kreasi, model dan penampilan produk yang baru. Keberhasilan strategi inovasi yang dilakukan tergantung pada budaya organisasi atau perusahaan. Diperlukan kerjasama, pemikiran yang terbuka dan dukungan semua pihak untuk tercapainya keberhasilan inovasi dalam mencapai keunggulan kompetitif dan menjadi organisasi atau perusahaan yang unggul dalam persaingan global.

3. Strategi Operasi

Ellitan memandang strategi operasi atau manufaktur sebagai kekuatan manufaktur yang efektif sebagai satu senjata kompetitif untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Strategi manufaktur yang diimplementasikan akan memengaruhi tujuan dan strategi perusahaan dan memungkinkan fungsi-fungsi manufaktur untuk memberikan kontribusi dalam meningkatkan daya saing perusahaan dalam jangka panjang. Strategi manufaktur mewakili prioritas kompetitif, yaitu meliputi biaya, kualitas, fleksibilitas dan pengiriman.

2. Organisasi

Menurut **Winardi (2006:13)** organisasi merupakan sebuah sistem yang terdiri dari aneka macam elemen atau subsistem terpenting, diantara manusia mungkin merupakan suatu sistem tercapai penting, dan dimana terlihat bahwa masing-masing subsistem saling berintegrasi dalam upaya mencapai sasaran sasaran atau tujuan-tujuan organisasi yang bersangkutan. Organisasi dibentuk oleh manusia untuk memenuhi aneka macam kebutuhan publik, ekonomi, intelektual, spiritual, emosional dan lain sebagainya.

Menurut **Bernad dalam Sutarto (2006:23)** suatu organisasi adalah suatu sistem dari aktivitas-aktivitas orang yang terkoordinir secara sadar atau kekuatan-kekuatan yang terdiri dua orang atau lebih.

Sementara **Lane dalam Sutarto (2006:23)** organisasi adalah proses menggabungkan pekerjaan yang orang-orang atau kelompok harus melakukan dengan kekuasaan yang diperlukan untuk pelaksanaannya, sehingga kewajiban-kewajiban yang dilaksanakan demikian itu memberikan saluran-saluran terbaik bagi penyelenggaraan yang efisien, teratur, positif dan terkoordinasi.

Gulick mengatakan organisasi adalah alat saling hubungan satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang ditempatkan dalam struktur wewenang, sehingga pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh perintah para atasan kepada para bawahan, yang menjangkau dari puncak sampai kebawah dari seluruh badan usaha. Sementara Menurut **Usmarab (2004:358)** mengatakan organisasi sebagai suatu sistem sosial terbuka, memiliki ciri-ciri: membutuhkan kerjasama dengan organisasi-organisasi lain. Mengalami ketidakpastian terhadap kinerja masa depan mereka, mempunyai aneka bentuk strategi yang dapat diaplikasikan untuk mengelola ketidakpastian, dan saling tergantung dengan organisasi-organisasi lain.

3. Pembangunan

Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dsb) yang berprinsip "memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan" (menurut Brundtland Report dari [PBB, 1987](#)). Pembangunan berkelanjutan adalah terjemahan dari Bahasa Inggris, *sustainable development*. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran [lingkungan](#) tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan [ekonomi](#) dan keadilan sosial.

Menurut **Siagian (2008;5)** pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya.

Menurut (**Todaro & Smith 2003**) terjemahan **Arsyad (2011;45)** pembangunan harus dilihat sebagai suatu proses yang multidimensional yang mencakup perubahan-perubahan mendasar didalam struktur sosial, perilaku masyarakat, perbaikan institusi-institusi yang seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan ketidakmerataan distribusi pendapatan dan pemberantasan kemiskinan.

4. *Greenpeace*

Di tahun 1971, Suatu motivasi dan visi untuk menjadikan dunia menjadi hijau dan damai, berawal dari sekelompok aktivis yang berlayar dari Vancouver, Canada dengan kapal nelayan tua. Mereka adalah aktivis, Pendiri dari Greenpeace, Mereka percaya bahwa setiap orang dapat melakukan perubahan.

Misi mereka untuk "menjadi saksi kerusakan" karena percobaan nuklir yang dilakukan AS di Amchitka, Sebuah pulau kecil di lepas pantai Alaska. Amchitka adalah tempat perlindungan terakhir 3000 berang-berang dan rumah untuk elang kepala botak dan hewan liar lainnya.

Walaupun mereka menggunakan kapal tua bernama Phyllis Cormack, yang mengalami berbagai halangan sebelum sampai di Alaska, dalam perjalanan mereka menimbulkan banyak perhatian publik.

AS masih terus mendonasikan untuk bom itu, tapi suara dari suatu masalah harus didengar. Uji coba Nuklir berakhir pada tahun yang sama dan pulau tersebut dideklarasikan menjadi suaka untuk burung. Hari ini, Greenpeace adalah suatu

organisasi internasional yang berkampanye untuk kampanye lingkungan secara global. Amsterdam, Belanda adalah kantor pusat dari Greenpeace, telah mempunyai 2,8 Juta pendukung di seluruh dunia, Nasional dan kantor regional di 41 negara.

a. Prinsip

- Menjadi saksi atas kerusakan lingkungan dengan cara yang damai dan tanpa kekerasan.
- Menggunakan konfrontasi tanpa kekerasan untuk meningkatkan perhatian dan debat publik mengenai isu lingkungan.
- Dalam mengekspos ancaman terhadap lingkungan dan mencari solusi, kami tidak memiliki sekutu permanen ataupun lawan.
- Menjamin independensi sumber keuangan dari kepentingan politik atau komersial.
- Mencari solusi untuk mempromosikan secara luas dan menginformasikan perkembangan dari pilhan untuk lingkungan di sekitar masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

• **Aktifitas *Greenpeace* dalam Pengendalian dan Pengawasan Hutan di Provinsi Riau**

Aktifitas melakukan penyelamatan lingkungan yang dilakukan oleh *Greenpeace*, yaitu dengan memberikan solusi dalam penyelamatan lingkungan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, mulai dari perorangan, masyarakat, organisasi lingkungan, pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya yang memang peduli dengan keselamatan lingkungan di sekitarnya, tidak terkecuali salah satu organisasi lingkungan *Greenpeace* Indonesia.

“Sebagai salah satu organisasi lingkungan yang ada di Indonesia, Greenpeace sangat gencar mengkampanyekan pemakaian energi terbarukan, seperti pemanfaatan tenaga matahari, tenaga angin, air dan himbauan untuk menghentikan pemakaian sumber energi yang tidak ramah lingkungan kepada semua pihak,”

(**Sumber:** hasil wawancara dengan Rasmadya selaku Pimpinan Greenpeace Riau dan Campaigner).

Seperti penggunaan batubara dan minyak fosil yang sangat berdampak buruk bagi lingkungan saat ini, dan menginformasikan sekaligus mengkampanyekan kepada semua pihak mengenai dampak dari pemakaian sumber energi yang tidak ramah lingkungan dan aktifitas-aktifitas yang perlahan-lahan telah menghancurkan lingkungan disekitar kita. Bukan hanya berkampanye saja, *Greenpeace* juga menawarkan solusi yang bijak kepada semua pihak dan kepedulian terhadap lingkungan serta merangkul masyarakat untuk mendukung aktifitas mereka melakukan aksi langsung, protes ke pihak-pihak yang ikut terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pengerusakan hutan dan lingkungan yang ada di seluruh Indonesia, baik itu dari perusahaan lokal, perusahaan asing, maupun instansi pemerintah yang

memberikan ijin kepada perusahaan-perusahaan itu untuk melkakukan pembukaan lahan dengan cara menebang hutan alam untuk diolah menjadi bubur kertas dan akhirnya dijadikan hutan produksi.

Beberapa peranan *Greenpeace* dalam hal penyelamatan hutan dan lahan gambut di Riau yaitu:

- Dalam hal advokasi, yaitu yang terkait dengan rehabilitasi dan perlindungan terhadap hutan alam dan lahan gambut.

- Dalam hal monitoring, yaitu pengawasan dan memonitoring langsung pada program pelestarian hutan alam dan lahan gambut yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah.
- Dalam hal fasilitasi, yaitu pemberian solusi dan memfasilitasi program-program yang telah direncanakan.
- Dalam hal konsultasi, yaitu menjadi pihak yang memfasilitasi terjalinnya komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah.

(**Sumber:** wawancara dengan Zamzami selaku Media Campaigner Greenpeace Pekanbaru.)

Pelanggaran-pelanggaran atas penyalahgunaan hak dalam pengelolaan hutan, jelas telah merugikan pemerintah dan masyarakat yang ada disekitar daerah aktifitas perusahaan-perusahaan tersebut, bahkan tanah mereka juga ikut diambil oleh perusahaan tersebut yang ditebangi pohonnya dan dijadikan bagian dari lahan olahan perusahaan-perusahaan itu tanpa adanya ganti rugi yang layak dari pihak perusahaan, sehingga masyarakat yang menjadi korban kesewenang-wenangan pihak perusahaan, harus mengalami kerugian secara materi, bahkan harus meninggalkan tanah dan lahan tempat mereka bisa beraktifitas mencari pengasilan untuk memenuhi kebutuhan perekonomian sehari-hari.

“Menjamurnya industri kehutanan di Provinsi Riau telah menjadi salah satu penyebab degradasi hutan alam semakin idak terkendali. Sampai tahun 2000 jumlah industri kehutanan yang beroperasi di Provinsi Riau mencapai 312 unit yang terdiri dari industri kayu lapis (playwood) 10 unit, sawmil 270 unit, moulding 27 unit, chip mill sebanyak 3 unit dan 2 unit industri Pulp and Paper.”

(*Sumber: hasil wawancara dengan Zamzami selaku Media Campaigner Greenpeace Riau.*)

- **Kendala yang dihadapi Greenpeace dalam Aksi Pengendalian dan Pengawasan Hutan di Provinsi Riau**

Dalam melakukan aktifitasnya mengkampanyekan penyelamatan hutan dan lingkungan, *Greenpeace* tidak selalu berjalan dengan lancar, banyak tantangan dan kendala yang dihadapi oleh *Greenpeace*. tetapi itu tidak menyurutkan semangat dari organisasi ini untuk melanjutkan perjuangannya menjadikan lingkungan yang kembali bersih, hijau dan damai. “*masih banyak yang harus dilakukan untuk melindungi hutan alam dan lahan gambut di Provinsi Riau. Susahnya untuk memberi pengertian kepada pihak perusahaan yang melakukan aktifitas penebangan, bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak sehat bagi lingkungan apabila tidak dilakukan penghijauan kembali dan mengontrol cara operasional dengan tidak mengambil isi hutan secara membabi buta.*”

(*Sumber: hasil wawancara dengan Bapak Rasmadya selaku Pimpinan Greenpeace Pekanbaru.*)

Masih banyaknya aktifitas *illegal logging* dan pembukaan lahan dengan cara membakar, adalah salah satu kendala yang dihadapi oleh pihak *Greenpeace* dan pihak-pihak terkait lainnya dalam upaya melakukan perlindungan terhadap hutan dan lingkungan. Padahal semua itu ada aturannya yang telah diatur dalam undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Keterbatasan wewenang yang dimiliki oleh *Greenpeace* juga menjadi kendala dalam membuat keputusan dan memberikan sanksi kepada para perusak ekosistem lahan gambut merupakan salah satu hambatan dalam upaya perlindungan hutan lahan gambut. Keterbatasan

wewenang tersebut dikarenakan *Greenpeace* tidak memiliki kedaulatan untuk pengambilan keputusan di Indonesia. Kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak *Greenpeace* dalam kegiatannya dari beberapa hal, yaitu:

1. Pemerintah Pusat
 - a. Masih kurang tegasnya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat terhadap perlindungan hutan-hutan yang ada.
 - b. Tidak mempertimbangkan pemberian izin HPH (Hak Pengusahaan Hutan) kepada perusahaan-perusahaan, dan meninjau kembali apakah perusahaan tersebut berkomitmen untuk merehabilitasi hutan itu kembali setelah diproduksi.
2. Pemerintah Daerah
Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak maksimal, karena pihak perusahaan telah melakukan permainan orang dalam, atau memanfaatkan kekuasaan dari penguasa daerah ataupun pemerintah daerah dalam melindungi aktifitas mereka.
3. Pihak Perusahaan:
 - a. Pihak perusahaan melakukan pembukaan lahan dengan menebang semua hutan, dan membakar lahan gambut untuk selanjutnya dijadikan perkebunan kelapa sawit.
 - b. Mereka juga sering melakukan pembukaan lahan sampai melewati batas wilayah yang boleh mereka kelola.
4. Masyarakat:
 - a. Sulitnya mensosialisasikan kepada masyarakat untuk tidak melkkan penebangan hutan yang tidak terkontrol, atau mengambil hasil hutan tanpa melakukan pengrusakan terhadap hutan itu sendiri.

- b. Masih banyaknya warga yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar lahan gambut untuk mempercepat dan memperkecil biaya proses pembukaan lahan baru mereka, padahal hal tersebut dapat berdampak buruk untuk lingkungan.
- c. Masih minimnya rasa peduli masyarakat untuk terlibat dalam melindungi lingkungannya, sehingga banyak masyarakat yang melakukan pembakaran lahan.

SIMPULAN

Dalam kegiatan pelestarian hutan di Provinsi Riau, penulis menemukan bahwa keterbatasan wewenang yang dimiliki oleh *Greenpeace* sebagai INGO yang tidak memiliki kedaulatan dalam pengambilan keputusan serta pemberian sanksi kepada para perusak ekosistem hutan merupakan salah satu hambatan dalam upaya perlindungan hutan. Keterbatasan wewenang tersebut dikarenakan *Greenpeace* tidak memiliki kedaulatan untuk pengambilan keputusan di Indonesia. Meskipun kerja sama telah dilakukan oleh *Greenpeace* dengan pemerintah Indonesia, hutan di Provinsi Riau masih terus mengalami kerusakan. Selain itu, penulis juga menemukan bahwa ketidakseriusan pemerintah Indonesia dalam menangani kerusakan hutan dan rawa gambut juga menyebabkan lambatnya restorasi hutan di Provinsi Riau. Kebakaran hutan pada musim kemarau, pembalakan liar serta pembukaan lahan gambut yang dikonversi menjadi lahan perkebunan kelapa sawit merupakan permasalahan-permasalahan yang masih mengganggu upaya untuk melestarikan hutan dan rawa gambut.

Namun demikian dapat diakui bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan *Greenpeace* untuk melestarikan hutan dan

rawa gambut di Provinsi Riau telah cukup banyak memberikan hasil yang positif dalam rangka menurunkan angka kerusakan hutan dan lahan gambut di Provinsi Riau. Keberhasilan *Greenpeace* tersebut dapat dijadikan panutan untuk program pelestarian lingkungan di daerah-daerah lain di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Ellitan, Iena dan Lena Anatan. 2008. *Manajemen Strategi Operasi*.

Greenpeace Indonesia, 2013. *Izin Memusnahkan*, Published by Greenpeace International.

Greenpeace Indonesia, 2013. *Menuju Nol*, Inggris Raya.

Kuncoro, Mudrajad. 2006. *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*. Jakarta. Penerbit Erlangga.

Todaro, Smith terjemahan Arsyad Lincoln dkk, 2011. *Strategi Pembangunan Pedesaan Berbasis Lokal*. Yogyakarta : Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Sondang. Siagian. 2008. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta : Bumi AKsara

Sutarto, 2006. *Dasar-dasar organisasi*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Winardi, 2006. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.